

**STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DI
BADAN PELAYANAN TERPADU KOTA PEKANBARU DENGAN DINAS
PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN)**

Oleh:

FITRI IMELDA

Dosen pembimbing:

Dr. Tuti Khairani H, S.Sos, M.Si

E-mail: Fitri_imelda25@gmail.com HP: 081268301992

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

ABSTRAK

Dalam penelitian ini kajian yang diamati adalah Perbandingan Pelaksanaan *Electronic Government* di Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dengan Dinas Perizinan kota Yogyakarta. Pelaksanaan *Electronic Government* dalam hal pemerintahan, dapat meningkatkan tercapainya *good governance* dalam hal peningkatan keterbukaan, transparansi, akuntabel atau demokratis dibandingkan pemerintahan yang konvensional.

Pelaksanaan Pelayanan *Electronic Government* pada Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru belum melaksanakan *Electronic Government* secara maksimal, karena pelayanan yang dilakukan masih menggunakan cara-cara manual. Penggunaan alat dan sistem elektronik yang minim membuat pelayanan public dan pengurusan izin bagi masyarakat memakan waktu yang lama dan tidak dapat memberikan waktu yang pasti. Sedangkan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sudah melaksanakan pelayanan secara elektronik yang sangat memudahkan pemohon dalam melakukan perizinan. Pelayanan yang sistematis dan transparan membuat pelayanan public berjalan lebih teratur dan tertib. Penggunaan sistem *Rooting Slip* yang digunakan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta membuat proses pembuatan izin lebih jelas dan dapat diakses oleh pemohon secara langsung untuk mengetahui kepastian proses perizinan yang mereka lakukan.

Kata Kunci: Perbandingan, *Electronic Government*

PENDAHULUAN

Globalisasi teknologi merupakan sebuah fenomena yang diharapkan terwujudnya efisien dan efektif di berbagai negara di dunia saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia karena

jumlah penduduk yang menduduki urutan ke- 4 terbanyak didunia. Namun, Peringkat E-goverment negara-negara ASEAN menempatkan indonesia pada urutan ke – 7 setelah Singapura, Malaysia, Brunei , Vietnam, Philipines, dan Thailand.

Berdasarkan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, Badan Usaha, dan / masyarakat. Dasar hukum ini juga membantu penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih baik.

Kota Pekanbaru sudah melaksanakan kebijakan mengenai PTSP ini, yaitu dengan dibentuknya suatu badan yang bernama Badan Pelayanan Terpadu kota Pekanbaru yang dibentuk sejak 5 Januari 2009 melalui keputusan Walikota Pekanbaru nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru, dengan pelayanan perizinan maupun non perizinan terintegrasi sebanyak 42 jenis perizinan. Salah satu cara untuk melihat kinerja suatu lembaga dapat dilihat dari prestasi yang telah diraihnya. Sebagai bentuk kesuksesan dalam menjalankan tugasnya.

Pada Badan Pelayanan Terpadu kota Pekanbaru melayani perizinan dan non perizinan sebanyak 52 jenis sedangkan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta melayani perizinan dan non perizinan sebanyak 31 jenis. Berikut adalah rincian jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh BPT Kota Pekanbaru dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pjabaran diatas, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **“Studi Komparasi Pelaksanaan *Electronic Government* Di Badan**

Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Dengan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (Studi Kasus Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan)”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka perlu dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Electronic Government* di Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (Studi kasus Pelayanan izin Mendirikan Bangunan).
2. Bagaimana Perbandingan dalam Pelaksanaan *Electronic Government* di Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dengan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (Studi kasus Pelayanan izin Mendirikan Bangunan) berdasarkan pendekatan ekologi.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan *Electronic Government* di Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (Studi kasus Pelayanan izin Mendirikan Bangunan)
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan Pelaksanaan *Electronic Government* di Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dengan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (Studi kasus Pelayanan izin Mendirikan Bangunan) berdasarkan pendekatan ekologi.

KONSEP TEORI

Salah satu unsur terpenting dari penelitian adalah landasan teori yang digunakan.

Karlinger mendefinisikan teori sebagai rangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Menurut definisi ini teori mengandung tiga hal yaitu serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep dan menerangkan fenomena tertentu dengan menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya (Singarimbun dan Effendi, 1995:37).

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal (*personal service*) sampai jasa sebagai produk. Berbagai konsep mengenai pelayanan banyak dikemukakan oleh para ahli seperti **Haksever et al (2000)** menyatakan bahwa jasa atau pelayanan (*services*) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis. Menurut **Edvardsson et al (2005)** jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan.

Kerangka berpikir bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana kerangka pikir yang akan

digunakan untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang akan diteliti, ini dikemukakan oleh (sutopo, 2006:176). Sajian kerangka berpikir meski tidak harus disertai atau diwujudkan dalam bentuk gambar diagram, namun untuk kejelasan pola pikir diperlukan.

Konsep operasional adalah konsep yang dijadikan sebagai landasan untuk mengukur gejala permasalahan. Agar menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan konsep, maka pada penelitian ini penulis mengemukakan konsep-konsep operasional sebagai berikut :

1. pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah masyarakatnya yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
2. *Electronic Government* atau *E-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
3. Perbandingan Pelaksanaan *E-Government* di BPT Kota Pekanbaru dengan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Analisis dilakukan terhadap BPT Kota Pekanbaru dengan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan *E-Government* dimasing-masing lembaga melalui pendekatan Ekologi.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif Kualitatif . Menurut (H.B. Sutopo, 2006:111) Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskrisian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Metode kualitatif merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, apa yang ditulis dan dikatakan oleh orang /tingkah laku yang diamati. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan mengenai Analisis perbandingan pelaksanaan *E-Government* di BPT kota Pekanbaru dengan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Penelitian tentang Analisis Perbandingan Pelaksanaan *E-government* di BPT kota Pekanbaru dengan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dilakukan pada 2 badan yang berbeda, yaitu Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Kota pekanbaru, dan Dinas Perizinan kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kenari No. 56 kota Yogyakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono:2012). Data tersebut berupa data-data yang berasal dari BPT kota Pekanbaru dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta mengenai profil lembaga penyelenggara perizinan, Tugas dan Fungsi. Dan selanjutnya,

sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan. Data primer juga dapat di peroleh melalui observasi

b. Data sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (sugiyono:2012). Data sekunder dapat di peroleh dari dinas terkait yang berhubungan dengan pendekatan ekologi yang dilakukan, berita-berita di media masa, buku-buku, dan dokumentasi serta hal-hal lainnya yang menunjang terhadap kelengkapan data penelitian ini.

Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *informan* yang terdiri dari pihak-pihak yang melakukan pengawasan terhadap perizinan depot air minum yaitu dari Disperindag, diskes. Peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian. Untuk memperoleh informan tersebut peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelaskan obyek/situasi social yang akan diteliti (sugiyono:2012). Untuk mendapatkan data yang diperlukan

dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

Wawancara menurut Lincoln dan Guba dalam (Moleong, 2008:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat data-data, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada yang mencakup semua informasi yang berupa tulisan atau gambar dan ketentuan-ketentuan yang ada (Susanto,2006:137). Dokumentasi merupakan

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Teknik secara observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Susanto,2006:126).

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada proses analisa yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984). Dalam Sugiono (2012:91), ada tiga komponen yang merupakan model yang terjalin atau Model interaktif, yaitu: Reduksi Data, Sajian Data, dan Penarikan Kesimpulan

GAMBARAN UMUM

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau,

Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah kota Pekanbaru bertekad untuk menciptakan instrumen kebijakan pelayanan terpadu satu pintu yang terintegrasi semua SKPD terkait guna mempercepat proses pelayanan publik yang tepat dan bertanggung jawab. Di samping itu, lahirnya kebijakan tersebut, sekaligus diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan *problem solving* terhadap beragam keluhan dan kebutuhan masyarakat menyangkut kepentingan proses pelayanan publik.

Dalam penelitian ini kajian yang diamati adalah Perbandingan Pelaksanaan *Electronic Government* di Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dengan Dinas Perizinan kota Yogyakarta. Pelaksanaan *Electronic Government* dalam hal pemerintahan, dapat meningkatkan tercapainya *good governance* dalam hal peningkatan keterbukaan, transparansi, akuntabel atau demokratis dibandingkan pemerintahan yang konvensional. *E-government* juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mengokohkan sistem demokrasi yang ada. *Electronic Government* dimanfaatkan dalam pelayanan public untuk meningkatkan pelayanan birokrasi yang lebih baik dan transparan, juga menghilangkan paradigma lama mengenai administrasi yang bertele-tele dan memakan waktu yang lama.

Pelaksanaan *Electronic Government* pada pelaksanaan pelayanan public oleh lembaga pemerintah adalah pergeseran paradigm birokrasi yang lama dan berbelit-belit menjadi paradigma birokrasi yang efisien, transparan dan fleksibel yang akhirnya mewujudkan kepuasan pengguna layanan public. Dengan adanya perubahan paradigm ini sekaligus merubah infrastruktur sarana dan prasarana yang digunakan dalam pekerjaannya.

Pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan secara lebih tertib dan sistematis. Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan telah diberi kewenangan sepenuhnya kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Maka pengurusan

perizinan dilakukan sepenuhnya di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan SK IMB di tanda tangani oleh Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Berikut alur pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas perizinan

Perbandingan artinya melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama dalam objek tertentu. Perbandingan dapat pula diartikan dengan istilah membedakan dan menyamakan dua objek atau lebih. Perbandingan administasi negara adalah pengkajian tentang sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandigan. Perbandingan ini bertujuan membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, antara lain membandingkan administrasi penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah kemerdekaan, perbandingan administrasi tradisional dan modern, perbandingan administrasi negara monarki dan republik, dan lain sebagainya.

Perbandingan administrasi negara juga mengkaji perbandingan institusional dalam penyelenggaraan negara. Perbandingan institusional dilakukan seperti peerbandingan administarsi dilingkungan militer dan lingkungan sipil. Kedua institusi yang terdapat didalam negara memiliki perbedaan yang signifikan, diantaranya membandingkan pola penerimaan pegawai baru dilingkungan sipil dengan militer.

Perbandingan administrasi negara yang mengkaji perbandingan lembaga-lembaga negara yang tumbuh dan hidup didalam suatu

negara, juga mengkaji tentang pelaksanaan fungsi yang mengikuti sistem administrasi yang berbeda-beda namun memiliki unsur-unsur yang sama.

Unsur-Unsur yang terdapat dalam administrasi adalah:

1. Proses penyelenggaraan
2. Kerjasama dalam melaksanakan tugas
3. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

Sebagai suatu disiplin ilmu. Perbandingan administrasi negara juga dipandang sebagai metode yang tepat untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem administrasi diberbagai negara, sehingga negara-negara yang menginginkan perbaikan dibidang pengelolaan administrasi negara nya melakukan perbandingan antar negara dan mengambil kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh negara lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekologi. Melihat dari lingkungan dan tempat yang diduduki oleh kedua objek penelitian.

Fred. W. Riggs dalam (Anggara 31 : 2012) menggambarkan faktor ekologi administrasi negara di Amerika Serikat yang meliputi dasar-dasar ekonomi, struktur sosial, jaringan komunikasi, pola-pola ideologis, dan sistem politik.

1. Ekonomi

Menurut **Manulang** (Pengertian ekonomi menurutnya adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran, yaitu

keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya dari segi pemenuhan barang maupun jasa.

Ekonomi merupakan hal terpenting untuk keberlangsungan hidup manusia. Dimana Ekonomi adalah penggerak kehidupan yang dilakukan pelaku ekonomi yaitu produsen dan konsumen. Bagi suatu daerah untuk pembangunan daerahnya diperlukan kesanggupan ekonomi yang nantinya dapat menentukan keberhasilan membangun daerah tersebut.

Faktor yang pertama dalam pendekatan ekologi adalah mengenai ekonomi, Keadaan ekonomi daerah dapat dilihat dari nilai investasi yang ditanamkan pada daerah tersebut. Investasi dapat menjadi mesin penggerak roda perekonomian suatu wilayah. Penyebab salah satu peningkatan investasi di suatu daerah adalah kemudahan izin untuk berinvestasi bagi investor, baik dari domestik maupun asing. Karena kemudahan untuk berinvestasi adalah salah satu pertimbangan investor untuk menanam modal. Apabila perizinan berinvestasi tidak mulus maka akan menciutkan niat investor untuk berinvestasi.

Provisi Riau selalu menempati peringkat 5(lima) besar investasi di Indonesia. Karena sumberdaya allam yang dimilikinya menjadikan Provinsi Riau sebagai destinasi investasi yang menjanjikan. Kota pekanbaru adalah ibukota provinsi maka menjadi destinasi investasi, namun pada ttahun 2010 dan 2011 terjadi penurunan nilai investasi pada Kota Pekanbaru. Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Promosi

Daerah Provinsi Riau dalam Statistik Investasi Provinsi Riau Tahun 2012 menunjukkan penurunan nilai investasi.

2. Struktur Sosial

Struktur sosial merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat, yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku di dalam masyarakat. Menurut **selo Sumarjan (Soekanto 2000 : 14)** Terdapat 3(tiga) bentuk masyarakat dalam struktur sosial, yaitu:

1. Masyarakat Sederhana, ciri-ciri struktur sosial dan budaya masyarakat sederhana adalah sebagai berikut:
 - a. Ikatan keluarga dan masyarakatnya sangat kuat.
 - b. Organisasi sosial berdasarkan tradisi turun temurun
 - c. Memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kekuatan gaib
 - d. Tidak memiliki lembaga-lembaga khusus, seperti lembaga pendidikan.
 - e. Hukum yang berlaku tidak tertulis
 - f. Sebagian besar produksi hanya untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk pasaran skala kecil.
 - g. Kegiatan ekonomi dan sosial dilakukan secara bergotong royong.
2. Masyarakat madya, ciri-ciri struktur sosial dan budaya masyarakat sederhana adalah sebagai berikut:
 - a. Ikatan keluarga masih kuat, tapi hubungan dengan masyarakat setempat sudah mengendor.
3. Masyarakat Modern, ciri-ciri struktur sosial dan budaya masyarakat sederhana adalah sebagai berikut:
 - a. Hubungan sosial berdasarkan atas kepentingan pribadi
 - b. Hubungan dengan masyarakat lainnya sudah terbuka dan saling mempengaruhi
 - c. Kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sangat kuat
 - d. Terdapat stratifikasi sosial atas dasar keahlian
 - e. Tingkat pendidikan formal tinggi

- f. Hukum yang berlaku sudah hukum tertulis
- g. Ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat pembayaran lain.

Struktur Sosial merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat, yang didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku didalam masyarakat. Terdapat 3 (tiga) macam masyarakat berdasarkan struktur sosial, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat madya, dan masyarakat modern.

Kota Pekanbaru adalah ibukota dari Provinsi Riau, begitu juga dengan Kota Yogyakarta yang merupakan ibukota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat di kedua kota tersebut tergolong dalam masyarakat madya. Sebagai penduduk ibu kota yang menjadi pusat perkembangan ekonomi dan paling pesat dalam hal perkembangan teknologi.

3. Jaringan Komunikasi

Pengertian jaringan komunikasi menurut **Rogers (1983)** adalah suatu jaringan yang terdiri atas: individu-individu yang saling berhubungan, yang dilmbungkan oleh arus komunikasi yang terpola.

Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Jaringan ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, kelompok kecil sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya akan mengembangkan pola komunikasi yang menggabungkan beberapa

struktur jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini kemudian merupakan sistem komunikasi umum yang akan digunakan oleh kelompok dalam mengirimkan pesan dari satu orang ke orang lainnya. Kedua, jaringan komunikasi ini bias dipandang sebagai struktur yang diformalkan yang diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi organisasi.

Badan Pelayanan Terpadu kota Pekanbaru belum menerapkan sistem pengelolaan komunikasi pegawai yang terintegrasi. Semua komunikasi antar atasan dan pegawai masih dilakukan secara manual, yaitu melalui pengumuman tertulis pada papan pemberitahuan di kantor masing-masing. Seperti yang diutrakan Bapak Rudi Misdian, S.Pi. selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan Program.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa belum tersedianya jaringan komunikasi yang efektif dan efisien untuk kawan intern Badan Pelayan Terpadu Kota Pekanbaru. Dilihat dari belum tersedianya jaringan komunikasi ini maka wajar saja apabila hubungan BPT Kota Pekan baru dengan masyarakat juga masih berinteraksi dengan cara bertatap muka langsung. Meski telah memiliki website yang dapat memberikan keterangan seputar informasi perizinan namun masih hanya sebatas interaksi satu arah atau masih pada layanan elektronik Publish.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki Sistem Informasi Manajemen yang terhubung dengan seluruh unsur pemerintahan se-Kota Yogyakarta.

Melalui pihak ketiga pemerintah Kota Yogyakarta membuat sebuah jaringan yang membuat jaringan internet dan intranet untuk hampir seluruh instansi di pemerintahan Kota Yogyakarta. Jaringan ini dapat digunakan sebagai jalur komunikasi seluruh instansi yang ada, yaitu bidang kependudukan, bidang keuangan, bidang kesehatan, dan lainnya. Berikut pernyataan dari Bapak Dodit Sugeng Murdowo, SH. Selaku Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

4. Pola Ideologis

Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Ideologi merupakan cerminan cara berfikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya.

Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat, yang harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun masyarakat. Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai

wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian nilai itu mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau normatif dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya. Pengertian yang demikian itu juga dapat dikembangkan untuk masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat bangsa.

Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Ideologi merupakan cerminan cara berfikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya.

5. Sistem politik

Sistem politik ialah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan, kesatuan yang dimaksudkan dapat berupa negara atau masyarakat

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi

yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan:

1. Pelaksanaan Pelayanan *Electronic Government* pada Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru belum melaksanakan *Electronic Government* secara maksimal, karena pelayanan yang dilakukan masih menggunakan cara-cara manual. Penggunaan alat dan sistem elektronik yang minim membuat pelayanan public dan pengurusan izin bagi masyarakat memakan waktu yang lama dan tidak dapat memberikan waktu yang pasti. Sedangkan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sudah melaksanakan pelayanan secara elektronik yang sangat memudahkan pemohon dalam

melakukan perizinan. Pelayanan yang sistematis dan transparan membuat pelayanan public berjalan lebih teratur dan tertib. Penggunaan sistem *Rooting Slip* yang digunakan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta membuat proses pembuatan izin lebih jelas dan dapat diakses oleh pemohon secara langsung untuk mengetahui kepastian proses perizinan yang mereka lakukan.

2. Perbandingan Administrasi negara Melalui Pendekatan Ekologi mempunyai 5 (lima) indikator yaitu : Ekonomi, Struktur Sosial, Jaringan komunikasi, Pola Ideologis, dan Sistem Politik. Dari Ekonomi, Perekonomian Kota Pekanbaru dan Kota Yogyakarta dilihat dari jumlah nilai investasi memang lebih baik Kota Yogyakarta. Proses Perizinan investasi yang mudah adalah salah satu daya tarik bagi investor yang akan menanamkan modal.maka dari itu nilai investasi Kota Yogyakarta lebih banyak dibandingkan kota pekanbaru hingga pemerintah Kota yogyakarta perlu membatasinya karena kepadatan penduduk dan tidak tersedianya lahan.Struktur sosial masyarakat madya pada kedua kota ini menjadikan tolok ukur penggunaan teknologi oleh masyarakatnya. Masyarakat kedua kota ini sebenarnya sudah terbiasa dengan penggunaan alat telekomunikasi yang sangat maju saat ini. Namun Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru belum menerapkan menggunakan alat elektronik dalam proses pelayanannya seperti yang dilakkukan Dinas perizinan Kota

Yogyakarta. Jaringan Komunikasi akan terbentuk apabila telah memiliki alat komunikasi yang memadai, Dinas perizinan yang termasuk dalam Pemerintahan kota Yogyakarta telah terhubung dan terintegrasi dengan hampir seluruh instansi pemerintah se-kota Yogyakarta. Pola ideologi pancasila adalah dasar yang dianut oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di Negara Indonesia. Sehingga Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dan Dinas Perizinan kota Yogyakarta juga menganut ideologi yang sama. Namun, latar belakang sejarah dan budaya lokal mempengaruhi masyarakatnya dalam pemahaman ideologi bangsa dan menjadi penentu komitmen kerja. Sistem Politik juga sebagai penentu terlaksananya *Electronic Government* pada instansi pemerintah. Pada proses sistem politik yang membutuhkan pembuat keputusan strategis menjadi kendala pada Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan *Electronic Government* pada instansi ini.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukannya perbaikan yang menjadikan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru lebih baik dalam bidang pelayanan public. Dapat mulai dilakukan dari melakukan study banding ke instansi serupa yang telah

melaksanakan pelayanan secara elektronik yang lebih baik. Sehingga dapat mengetahui secara langsung manfaat dari pelayanan secara elektronik tersebut dan memberikan inovasi baru dalam pengadaan pelayanan elektronik di Badan Pelayanan Terpadu itu sendiri.

2. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru perlu memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan pelayanan publicnya. Keadaan lingkungan yang menjadi kendala penyelenggaraan *Electronic Government* ini harus segera diatasi. Sebaiknya perbaikan pelayanan lebih dahulu dilakukan agar investor mulai tertarik untuk menanamkan modal dan menjadikan Pendapatan Asli daerah bertambah. Kepemimpinan dari Badan Pelayanan Terpadu yang belum dapat melaksanakan wewenang seutuhnya sebaiknya perlu diperhatikan mengingat keputusan penting harus segera dilaksanakan seperti pengadaan alat elektronik untuk pelayanan public.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Andrianto, Nico. 2007. *Good E-Government: Transparansi dan akuntabilitas Publik*

- Melalui *e-Government*.
Malang : Bayumedia
Publishing.
- Anggara, Sahya. 2012. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung : Pustaka Setia.
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *e-Government in Action*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- , 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan System Pelayanan Public Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta:Penerbit Andi
- Kencana inu, Tandjung Djamaudin, modeong Supardan. 1999. *Ilmu administrasi public*. Jakata : PT. Rineka cipta.
- Kumorotomo, Wahudi dan Subando Agus Margono. 2011. *Sistem Informasi manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Yogyakarta : UGM Press.
- Pasolong, harbani. 2010. *Teori administrasi negara republic Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- , 2012. *Metode dan teknik penelitian administrasi public*. Bandung : Alfabeta
- Pramuka, Gatot. 2010. *E-Government dan Reformasi Layanan Publik dalam Revitalisasi Administrasi neagara Reformasi Birokrasi dan E-Governance*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sinambela, Likan Poltak Dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Soehartono, irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakata : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian administrasi*. Bandung : Alfabeta
- , 2012. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Dokumen:**
- Inpres No. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- Skripsi:**
- Annisa, Citra. 2011. *Implementasi E-Government Melalui Bursa Kerja Online Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*. Depok.

Misrina, Eka. *Analisis Perbandingan Antara Rencana Strategis Tahun 2008-2013 Dengan Rencana Kerja Tahun 2008 Dan 2009 Di Dinas Perindustrian Perdagangan*

Dan Koperasi Kabupaten Banyumas. Surakarta.

Website:

<http://bpt.pekanbaru.go.id/>

<http://perizinan.jogjakota.go.id>